LAMPIRAN XLVII
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/ 350 /K/411.013/2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

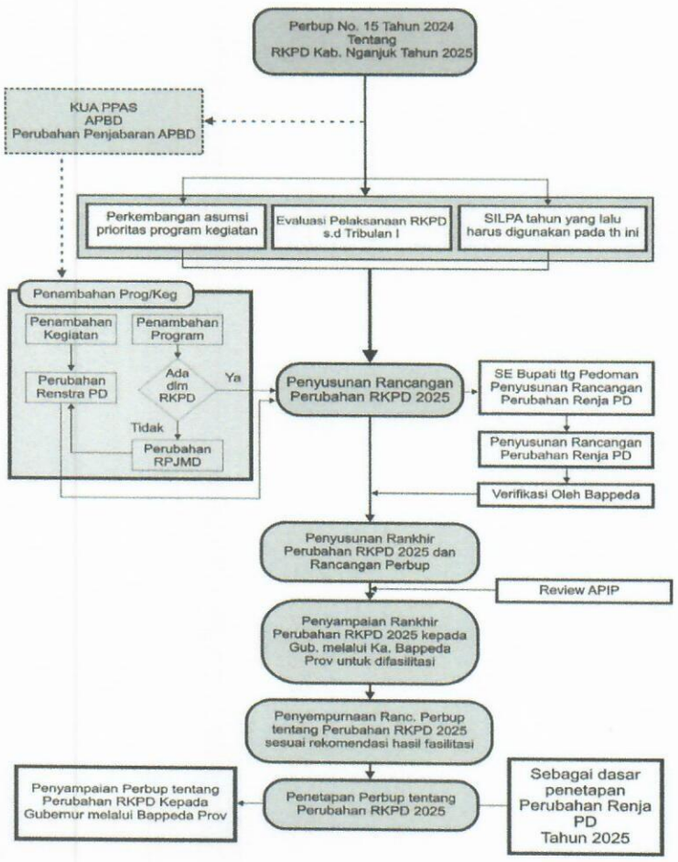
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut

Gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I tahun berkenaan pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OI4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Kecamatan Sukomoro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Sukomoro Tahun 2024-2026 pada tahun ke-2 (kedua) periode tahun 2025; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Pelaksanaan evaluasi Renja Kecamatan Sukomoro sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Sukomoro melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Kecamatan Sukomoro Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sukomoro Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025, serta pencapaian Renstra Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Sukomoro tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Nganjuk

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sukomoro

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu N-2 (2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun N-1 yang dievaluasi) 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capain Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7		11=6+9		12=11/5*100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		UNSUR KEWILAYAHAN			5.531.213.158		5.129.550.499		5.502.194.892		445.468.701	0,00	445.468.701	#DIV/0!	8,10%	0,00	5.575.019.200	#DIV/0!	100,79%	Kecamatan Sukomoro
		Administrasi Pemerintahan(Kecamatan)			5.531.213.158		5.129.550.499		5.502.194.892		445.468.701	0,00	445.468.701	#DIV/0!	8,10%	0,00	5.575.019.200	#DIV/0!	100,79%	
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan	76	4.348.213.158	69,85	4.115.661.949	75	4.472.671.603	0	419.899.701	0,00	419.899.701	0,00%	9,39%	69,85	4.535.561.650	0,93	104,31%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	27	18.000.000	7,00	7.006.000	9	18.322.250	3	0	3,00	0	33,33%	0,00%	10,00	7.006.000	0,37	38,92%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	2	3.500.000	2,00	938.000	2	2,734.000	1,00	0	1,00	0	50,00%	0,00%	3,00	938.000	0,50	26,80%	
		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	3.500.000	1,00	480.000	1	4.000.000	1,00	0	1,00	0	100,00%	0,00%	2,00	480.000	0,67	13,71%	
		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD	3	2.000.000	1,00	890.000	1	2.455.000	1,00	0	1,00	0	100,00%	0,00%	2,00	890.000	0,67	44,50%	

		Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	2.000.000	1,00	1.176.000	1	2.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	1,00	1.176.000	0,33	58,80%	
		Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD	3	1.750.000	0,00	0	1	2.118.600	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	3.500.000	1,00	2.397.000	2	1.748.650	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	1,00	2.397.000	0,17	68,49%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	3	1.750.000	1,00	1.125.000	1	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	1,00	1.125.000	0,33	64,29%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah**	**120**	**3.467.582.616**	**317,00**	**3.216.829.372**	**40**	**3.580.618.103**	**3**	**374.449.921**	**3,00**	**374.449.921**	**7,50%**	**10,46%**	**#REF!**	**3.591.279.293**	**#REF!**	**103,67%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	3.450.082.616	312,00	3.212.304.372	30	3.569.368.103	3,00	374.449.921	3,00	374.449.921	10,00%	10,49%	#REF!	3.586.754.293	#REF!	103,96%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	4.000.000	0,00	0	2	2.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	#REF!	0	#REF!	0,00%	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	2.000.000	0,00	0	1	1.250.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	#REF!	0	#REF!	0,00%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3	2.000.000	1,00	1.125.000	1	1.250.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	#REF!	1.125.000	#REF!	56,25%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	3.500.000	2,00	2.200.000	2	2.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	#REF!	2.200.000	#REF!	62,86%	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	umlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	2.000.000	0,00	0	1	1.250.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	#REF!	0	#REF!	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	6	2.000.000	1,00	600.000	2	1.250.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	#REF!	600.000	#REF!	30,00%	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	2.000.000	1,00	600.000	1	1.250.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	#REF!	600.000	#REF!	30,00%	

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**54**	**15.000.000**	**11,00**	**4.500.000**	**18**	**9.992.150**	**1**	**0**	**1,00**	**0**	**5,56%**	**0,00%**	**12,00**	**4.500.000**	**0,22**	**30,00%**	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD	3	2.000.000	1,00	1.125.000	1	1.256.500	1,00	0	1,00	0	100,00%	0,00%	2,00	1.125.000	0,67	56,25%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah DokumenPengamanan Barang MilikDaerah SKPD	3	2.000.000	1,00	1.125.000	1	1.265.350	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	1,00	1.125.000	0,33	56,25%	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3	2.000.000	0,00	0	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00%	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3	2.000.000	1,00	1.125.000	1	2.752.200	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	1,00	1.125.000	0,33	56,25%	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	3.500.000	6,00	0	12	718.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	6,00	0	0,17	0,00%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	1.750.000	1,00	1.125.000	1	2.001.700	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	1,00	1.125.000	0,33	64,29%	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen HasilPemanfaatan Barang MilikDaerah SKPD	3	1.750.000	1,00	0	1	1.998.400	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	1,00	0	0,33	0,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**24**	**51.750.000**	**70**	**48.757.000**	**8**	**42.892.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**70,00**	**48.757.000**	**2,92**	**94,22%**	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3	1.750.000	0	0	1	261.500	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90	18.000.000	0	0	30	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00%	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	2.000.000	0	0	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	2.000.000	0	0	1	753.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	2.000.000	0	0	1	996.200	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90	15.000.000	26	47.632.000	30	29.024.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	26,00	47.632.000	0,29	317,55%	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orangyang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600	7.500.000	70	1.125.000	200	8.357.500	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	70,00	1.125.000	0,12	15,00%	

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	210	3.500.000	0	0	70	3.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah**	**90**	**135.380.542**	**42,25**	**136.350.290**	**30**	**136.660.400**	**4**	**10.779.700**	**4,00**	**10.779.700**	**13,33%**	**7,89%**	**46,25**	**147.129.990**	**0,51**	**108,68%**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	3.500.000	1,00	3.650.000	1	3.488.500	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	1,00	3.650.000	0,17	104,29%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	3.500.000	0,00	0	1	4.078.600	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	3.500.000	1,00	3.800.000	1	3.800.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	1,00	3.800.000	0,17	108,57%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	25.000.000	1,00	30.313.490	1	39.131.800	0,00	4.481.000	0,00	4.481.000	0,00%	11,45%	1,00	34.794.490	0,17	139,18%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	10.000.000	1,00	8.400.000	1	10.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	1,00	8.400.000	0,17	84,00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	2.000.000	12,00	2.000.000	12	2.400.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	12,00	2.000.000	0,17	100,00%	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6	2.500.000	0,00	0	1	2.239.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu	36	6.000.000	3,00	900.000	12	6.750.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	3,00	900.000	0,08	15,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	46.380.542	51,00	60.409.500	50	34.216.000	2,00	1.500.000	2,00	1.500.000	4,00%	4,38%	53,00	61.909.500	0,35	133,48%	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	3.500.000	2,00	1.985.000	4	2.572.850	2,00	1.105.000	2,00	1.105.000	50,00%	42,95%	4,00	3.090.000	0,33	88,29%	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	4.500.000	0,00	0	1	3.750.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Kapas)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	3.500.000	1,00	3.451.000	1	3.550.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	1,00	3.451.000	0,17	98,60%	Kelurahan Kapas
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Kapas)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	3.000.000	1,00	2.992.400	1	3.495.900	0,00	875.000	0,00	875.000	0,00%	25,03%	1,00	3.867.400	0,17	128,91%	Kelurahan Kapas
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Kapas)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	2.500.000	1,00	2.500.000	1	2.750.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	1,00	2.500.000	0,17	100,00%	Kelurahan Kapas
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Kapas)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	7.500.000	1,00	7.499.100	1	5.665.450	0,00	1.948.700	0,00	1.948.700	0,00%	34,40%	1,00	9.447.800	0,17	125,97%	Kelurahan Kapas
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Kapas)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	4.000.000	1,00	3.950.000	1	3.366.000	0,00	870.000	0,00	870.000	0,00%	25,85%	1,00	4.820.000	0,17	120,50%	Kelurahan Kapas

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Kapas)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	2.000.000	12,00	2.000.000	12	2.400.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	12,00	2.000.000	0,17	100,00%	Kelurahan Kapas
		Penyediaan Bahan/Material (Kelurahan Kapas)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6	2.500.000	1,00	2.499.800	1	2.506.300	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	1,00	2.499.800	0,17	99,99%	Kelurahan Kapas
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**51**	**150.000.000**	**8,00**	**142.688.000**	**17**	**163.849.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**8,00**	**142.688.000**	**0,16**	**95,13%**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	jumlahPengadaan KendaraaanDinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	1	300.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	300.000.000	0,0	0%	Kelurahan Sukomoro
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21	75.000.000	7,00	73.138.000	7	76.402.100	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	7,00	73.138.000	0,33	97,52%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21	60.000.000	6,00	55.100.000	7	61.813.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	6,00	55.100.000	0,29	91,83%	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6	10.000.000	6	8.750.000	2	10.481.950	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	6,00	8.750.000	1,00	87,50%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	5.000.000	3	5.700.000	1	5.152.850	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	3,00	5.700.000	1,00	114,00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Kapas)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Kelurahan Kapas
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Kelurahan Kapas)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6	0	6	0	0	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	6,00	0	1,00	#DIV/0!	Kelurahan Kapas
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**147**	**304.750.000**	**36,00**	**252.447.759**	**49**	**276.553.250**	**4,00**	**20.905.850**	**4,00**	**20.905.850**	**8,16%**	**7,56%**	**40,00**	**273.353.609**	**0,27**	**89,70%**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	36	80.000.000	12,00	84.965.266	12	78.208.000	3,00	6.388.630	3,00	6.388.630	25,00%	8,17%	15,00	91.353.896	0,42	114,19%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	55.000.000	12,00	11.711.342	12	27.600.000	3,00	1.984.888	3,00	1.984.888	25,00%	7,19%	15,00	13.696.230	0,21	24,90%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1.750.000	0,00	0	1	1.713.250	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Sukomoro)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	18.000.000	12,00	6.319.151	12	9.900.000	3,00	994.332	3,00	994.332	25,00%	10,04%	15,00	7.313.483	0,21	40,63%	Kelurahan Sukomoro
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Sukomoro)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	18.000.000	12,00	6.319.151	12	9.900.000	3,00	994.332	3,00	994.332	25,00%	10,04%	15,00	7.313.483	0,21	40,63%	Kelurahan Sukomoro
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Kapas)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	150.000.000	12,00	149.452.000	12	159.132.000	3,00	11.538.000	3,00	11.538.000	25,00%	7,25%	15,00	160.990.000	0,42	107,33%	Kelurahan Kapas

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Kapas)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	150.000.000	12,00	149.452.000	12	159.132.000	3,00	11.538.000	3,00	11.538.000	25,00%	7,25%	15,00	160.990.000	0,42	107,33%	Kelurahan Kapas
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**126**	**205.750.000**	**24,25**	**307.083.528**	**42**	**253.783.350**	**2**	**13.764.230**	**2,00**	**13.764.230**	**4,76%**	**5,42%**	**26,25**	**320.847.758**	**0,21**	**155,94%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	55.000.000	4,60	50.224.000	3	36.201.500	0,00	2.600.000	0,00	2.600.000	0,00%	7,18%	4,60	52.824.000	0,26	96,04%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	63	9.750.000	15,00	4.175.000	15	8.871.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	15,00	4.175.000	0,24	42,82%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27	15.000.000	5,00	14.850.000	5	15.650.000	1,00	3.430.000	1,00	3.430.000	20,00%	21,92%	6,00	18.280.000	0,22	121,87%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	102.500.000	2,00	213.085.728	2	166.021.400	0,00	5.188.630	0,00	5.188.630	0,00%	3,13%	2,00	218.274.358	1,00	212,95%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kelurahan Kapas)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	7.500.000	3,00	8.767.200	3	8.991.200	1,00	2.545.600	1,00	2.545.600	33,33%	28,31%	4,00	11.312.800	0,22	150,84%	Kelurahan Kapas
		Pemeliharaan Mebel (Kelurahan Kapas)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	63	3.000.000	6,00	2.998.300	6	3.995.500	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	6,00	2.998.300	0,10	99,94%	Kelurahan Kapas
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Kapas)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27	3.000.000	4,00	3.000.000	4	3.750.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	4,00	3.000.000	0,15	100,00%	Kelurahan Kapas
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Kapas)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	10.000.000	4,00	9.983.300	4	10.302.750	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	4,00	9.983.300	1,00	99,83%	Kelurahan Kapas
2	**Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**	**100**	**129.500.000**	**4,40**	**91.230.000**	**100**	**109.848.450**	**3,78%**	**4.150.000**	**0,04**	**4.150.000**	**0,04%**	**3,78%**	**4,44**	**95.380.000**	**0,04**	**73,65%**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**126**	**100.000.000**	**2,00**	**71.880.000**	**42**	**79.442.550**	**0**	**4.150.000**	**0,00**	**4.150.000**	**0,00%**	**5,22%**	**2,00**	**76.030.000**	**0,02**	**76,03%**	

		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	100.000.000	2,00	71.880.000	2	79.442.550	0,00	4.150.000	0,00	4.150.000	0,00%	5,22%	2,00	76.030.000	0,33	76,03%	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**6**	**4.500.000**	**2,00**	**3.375.000**	**2**	**5.406.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**3.375.000**	**0,33**	**75,00%**	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6	4.500.000	2,00	3.375.000	2	5.406.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00	3.375.000	0,33	75,00%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**12**	**25.000.000**	**4,00**	**15.975.000**	**4**	**24.999.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**4,00**	**15.975.000**	**0,33**	**63,90%**	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	25.000.000	4,00	15.975.000	4	24.999.900	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	4,00	15.975.000	0,33	63,90%	
3	**Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**100**	**538.500.000**	**77,50**	**454.803.550**	**100**	**471.201.439**	**3,91%**	**18.419.000**	**0,04**	**18.419.000**	**0,04%**	**3,91%**	**77,54**	**473.222.550**	**0,78**	**87,88%**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**54**	**163.500.000**	**17,50**	**97.442.450**	**18**	**112.896.000**	**10**	**10.826.000**	**10,00**	**10.826.000**	**55,56%**	**9,59%**	**27,50**	**108.267.450**	**0,61**	**66,22%**	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27	30.000.000	9,00	22.055.000	9	33.345.000	9,00	5.000.000	9,00	5.000.000	100,00%	14,99%	18,00	27.055.000	0,67	90,18%	
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	9	133.500.000	8,50	25.575.000	9	79.550.000	1,00	5.825.000	1,00	5.825.000	11,11%	7,32%	9,50	31.400.000	1,06	23,52%	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0	0	249,00	49.812.450	0	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	249,00	49.812.450	#DIV/0!	#DIV/0!	

		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah Keluarga Yang Aktif Dalam Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**450**	**20.000.000**	**39,00**	**3.375.000**	**150**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**39,00**	**3.375.000**	**0,09**	**16,88%**	
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	450	20.000.000	39,00	3.375.000	150	20.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	39,00	3.375.000	0,09	16,88%	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonoomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**63**	**355.000.000**	**21,00**	**353.986.100**	**21**	**338.306.439**	**11**	**7.594.000**	**11,00**	**7.594.000**	**52,38%**	**2,24%**	**32,00**	**361.580.100**	**0,51**	**101,85%**	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Sukomoro)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27	5.000.000	9,00	4.368.600	9	4.994.000	9,00	4.994.000	9,00	4.994.000	100,00%	100,00%	18,00	9.362.600	0,67	187,25%	Kelurahan Sukomoro
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sukomoro)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	250.000.000	2,00	249.618.750	2	270.062.289	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00	249.618.750	0,33	99,85%	Kelurahan Sukomoro
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kapas)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	250.000.000	2,00	249.618.750	2	270.062.289	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00	249.618.750	0,33	99,85%	Kelurahan Sukomoro
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Keurahan Sukomoro))	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30	100.000.000	10,00	99.998.750	10	63.250.150	2,00	2.600.000	2,00	2.600.000	20,00%	4,11%	12,00	102.598.750	0,40	102,60%	Kelurahan Kapas
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kapas)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30	100.000.000	10,00	99.998.750	10	63.250.150	2,00	2.600.000	2,00	2.600.000	20,00%	4,11%	12,00	102.598.750	0,40	102,60%	Kelurahan Kapas
4	**Prosentasi Penurunan Pelanggaran ketentraman umum di wilayah kecamatan**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangan**	**100**	**77.500.000**	**36,00**	**45.325.000**	**100**	**102.629.000**	**0,00%**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**36,00**	**45.325.000**	**0,36**	**58,48%**	

		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**72**	**60.000.000**	**24,00**	**39.700.000**	**24**	**88.429.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**24,00**	**39.700.000**	**0,33**	**66,17%**	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36	45.000.000	12,00	25.900.000	12	68.529.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	12,00	25.900.000	0,33	57,56%	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	36	15.000.000	12,00	13.800.000	12	19.900.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	12,00	13.800.000	0,33	92,00%	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**36**	**17.500.000**	**12,00**	**5.625.000**	**12**	**14.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**12,00**	**5.625.000**	**0,33**	**32,14%**	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	36	17.500.000	12,00	44.050.000	12	14.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	12,00	44.050.000	0,33	251,71%	
6	**Prosentasi Penurunan Pelanggaran ketentraman umum di wilayah kecamatan**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**100**	**47.500.000**	**102,00**	**44.050.000**	**100**	**20.400.000**	**0,00%**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**102,00**	**44.050.000**	**1,02**	**92,74%**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**27**	**47.500.000**	**102,00**	**44.050.000**	**9**	**20.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**102,00**	**44.050.000**	**3,78**	**92,74%**	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300	30.000.000	100,00	39.550.000	100	10.400.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	100,00	39.550.000	0,33	131,83%	

		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6	17.500.000	2,00	4.500.000	2	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00	4.500.000	0,33	25,71%	
6	**Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**ProsentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang**	**100**	**390.000.000**	**23,00**	**378.480.000**	**100**	**325.444.400**	**0,92%**	**3.000.000**	**0,01**	**3.000.000**	**0,01%**	**0,92%**	**23,01**	**381.480.000**	**0,23**	**97,82%**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang**	**14**	**390.000.000**	**23,00**	**378.480.000**	**14**	**325.444.400**	**1**	**3.000.000**	**1,00**	**3.000.000**	**7,14%**	**0,92%**	**24,00**	**381.480.000**	**1,71**	**97,82%**	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27	17.500.000	9,00	9.000.000	9	19.499.800	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	9,00	9.000.000	0,33	51,43%	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Des	24	4.500.000	8,00	3.375.000	8	4.848.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	8,00	3.375.000	0,33	75,00%	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6	3.000.000	2,00	1.125.000	2	9.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00	1.125.000	0,33	37,50%	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kapas)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12	365.000.000	4,00	364.980.000	4	291.596.600	1,00	00.000	1,00	3.000.000	25,00%	1,03%	5,00	367.980.000	0,42	100,82%	Kelurahan Kapas

Dari tabel tersebut diatas untuk Capaian Kinerja Kinerja dapat diuraikan analisisnya sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   Terkait dengan Nilai SAKIP Kecamatan dari target Nilai 75 belum ada nilainya karena penilaian SAKIP dilaksanakan pada Triwulan - II

   Adapun kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target 9 Dokumen realisasi sebanyak 3 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 33,33%
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target 40 Dokumen realisasi sebanyak 3 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 7,50%
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dari target 18 Dokumen realisasi sebanyak 1 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 5,56%
   d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat dari target 8 Dokumen realisasi sebesar 0 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 0,00%
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target 30 Dokumen realisasi sebanyak 4 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 13,33%
   f. Pengadaan Barang Milik Daerah dari target 17 Unit realisasi sebanyak 0 Unit, hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 0,00%
   g. Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah dari target 49 Laporan realisasi sebesar 4 Laporan hal ini menunjukan capaian kenerja sebesar 8,16 %
   h. Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah dari target 42 Unit realisasi sebesar 2 Unit hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 4,76%

2. **Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik**

Dari target 100,00% realisasinya 3,78% sehingga capaian kinerjanya 0,04%.

Adapun kegiatan dari Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik capaiannya antara lain :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dari target 42 Laporan realisasi 0 laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 0,00%
b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dari target 2 Laporan realisasi 0 laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 0,00%
c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dari target 4 Laporan realisasi 0 laporan 0,00%

Hal ini menunjukan kegiatan-kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditentukan.

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Dari target 100 % realisasinya 3,91% sehingga capaian kinerjanya 0,04%.

Hal ini menunjukan kegiatan ini belum mencapai target sesuai dengan yang telah ditentukan.

Adapun kegiatanya dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dari target 18 Lembaga tercapai 10 Lembaga sehingga capaian kinerjanya 55,56%
   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan
b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dari target 150 Keluarga hanya tercapai 0 Keluarga sehingga target hanya tercapai 0,00%
c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dari target 0 Keluarga hanya tercapai 0 Keluarga sehingga target hanya tercapai 0,00%

d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan target 21Lembaga Kemasyarakatan realisasi sebanyak 11 Lembaga Kemasyarakatan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 52,38%.

4. Program Koordinasi Ketentranman dan Ketertiban Umum

Dari target 100 % realisasinya 0,00% sehingga capaian kinerjanya 0,00%

Adapun Kegiatan dari Program Koordinasi Ketentranman dan Ketertiban Umum yaitu,

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari target 24 Laporan realisasi sebanyak 0 Laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 0,00%

b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dari target 12 Laporan realisasi sebanyak 0 Laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 0,00%.

5. Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Di Kecamatan Sukomoro pada tahun 2025 dari target 100 % realisasi 0 % , hal ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 0.00%

Adapaun Kegiatan dari Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dari tanget 9 Lembaga/Organisasi Masyarakat terealisasi 0,00% menunjukkan capaian kinerja sebesar 0,00 %

Hal ini menunjukan kegiatan ini belum sesuai dengan Target yang telah ditentukan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa

Dari target 100% realisasi sebesar 0,01% hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 0,01%

Adapaun kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengawasan Desa yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari target 14 Desa/Kelurahan (23 Dokumen) realisasi sebanyak 1 Dokumen , hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 7,14%

Hal ini menunjukan kegiatan ini belum sesuai dengan target yang telah ditentukan/direncanakan.

Adapun ntuk Capaian Anggaran Program Kecamatan Sukomoro Tahun 2025 untuk analisisnya adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Hasil program ini adalah meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Sukomoro, dengan Anggaran Rp. 3.317.289.128,00 realisasi Rp. **419.899.701**,00 atau penyerapan dana sebesar 9,39%

   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala sangat rendah.

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

   Hasil program ini adalah meningkatnya prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang ditindaklanjuti, dengan anggaran Rp 37.580.000,00 realisasi Rp. 4.150.000,00 atau penyerapan dana sebesar 3,78%

   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala sangat rendah.

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

   Hasil dari program ini adalah meningkatnya Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan anggaran Rp. 64.260.000,00 realisasi Rp. **18.419.000**,00 atau penyerapan anggaran sebesar 3,91%

   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala sangat rendah.

4. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

   Hasil dari program ini adalah meningkatnya prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang ketentraman

dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti, dengan anggaran sebesar Rp 35.702.200,00 realisasi Rp 0,00, atau penyerapan anggaran sebesar 0,00%,

Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala sangat rendah.

5. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

   Hasil program ini adalah meningkatnya Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti, dengan anggaran Rp 49.500.000,00 realisasi Rp 0,00 atau penyerapan dana sebesar 0,00%.

   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala sangat rendah.

6. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

   Hasil program ini adalah meningkatnya Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan anggaran Rp 131.898.000,00 realisasi Rp 3.000.000,00 atau penyerapan dana sebesar 0,92%.

   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala sangat rendah.

Analisis Realisasi Output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Untuk realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Kecamatan Sukomoro Tahun 2025 belum tercapai dengan baik seperti Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan belum terisinya Pejabat Struktural di Kecamatan Sukomoro yaitu Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian sehinga berpengaruh signifikanpada serapan anggaran.

Dengan ini dapat disimpulkan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada belum bisa dicapai target yang ditentukan, dikarenakan oleh belum tepatnya planning perencanaan dan penyerapan anggaran

dalam penentuan target pada Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta karena adanya Instruksi Bupati Nomor : 100.3.4.2/189/411.000/2025 tanggal 25 Januari tentang efisiensi dalam anggaran yang berakibat tertundanya penyerapan anggaran .

Analisis Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2025

Untuk realisasi keuangan Kecamatan Sukomoro pada Tahun 2025 (Triwulan I) yaitu dengan anggaran sebesar Rp 5.183.956.464,00 telah terserap/terealisasi Rp 445.468.701,00 sehingga realisasi yang telah tercapai yaitu 8,10%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,39%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
1. Ada beberapa kegiatan kurang tepat dalam penganggaran, sehingga tidak maksimal dalam realisasinya 2. Instruksi Bupati Nomor : 100.3.4.2/189/411.000/2025 tanggal 25 Januari tentang efisiensi dalam anggaran yang berakibat tertundanya penyerapan anggaran	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Untuk kedepanya agar lebih tepat dalam penganggaran
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3,78%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
• Ada beberapa kegiatan kurang tepat dalam penganggaran, sehingga berimplikasi tidak maksimalnya dalam merealisasikan. • Instruksi Bupati Nomor : 100.3.4.2/189/411.000/2025 tanggal 25 Januari tentang efisiensi dalam anggaran yang berakibat tertundanya penyerapan anggaran	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Untuk kedepanya agar lebih tepat dalam penganggaran
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3,91%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
• Ada beberapa kegiatan kurang tepat dalam penganggaran, sehingga berimplikasi tidak maksimalnya dalam merealisasikan. • Instruksi Bupati Nomor : 100.3.4.2/189/411.000/2025 tanggal 25 Januari tentang efisiensi dalam anggaran yang berakibat tertundanya penyerapan anggaran	-	Untuk kedepanya agar lebih tepat dalam penganggaran
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0.00%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
• Ada beberapa kegiatan kurang tepat dalam penganggaran, sehingga berimplikasi tidak maksimalnya dalam merealisasikan. • Instruksi Bupati Nomor : 100.3.4.2/189/411.000/2025 tanggal 25 Januari tentang efisiensi dalam anggaran yang berakibat tertundanya penyerapan	-	Untuk kedepanya agar lebih tepat dalam penganggaran

anggaran		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0.00%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
• Adanya kegiatan yang kurang tepat dalam penganggaran, sehingga berimplikasi tidak maksimalnya dalam merealisasikan. • Instruksi Bupati Nomor : 100.3.4.2/189/411.000/2025 tanggal 25 Januari tentang efisiensi dalam anggaran yang berakibat tertundanya penyerapan anggaran	-	Untuk kedepanya agar lebih tepat dalam penganggaran
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0,92%.	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
• Adanya kegiatan yang kurang tepat dalam penganggaran, sehingga berimplikasi tidak maksimalnya dalam merealisasikan. • Instruksi Bupati Nomor : 100.3.4.2/189/411.000/2025 tanggal 25 Januari tentang efisiensi dalam anggaran yang berakibat tertundanya penyerapan anggaran	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Untuk kedepanya agar lebih tepat dalam penganggaran

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan I

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Tujuan :** Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	85	-	Belum dilaksanakan Penilaian
2	**Sasaran 1 :** Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	88	89,74	Capaian 101,97 (Memenuhi Target karena SDM di Pelayanan Sangat Profesional)
	Sasaran 2 : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	9	1	Capaian 11,1% (Belum Memenuhi Target karena Masih banyak Aksi Tawuran dan Kecelakaan Lalu Lintas

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan I

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukomoro
Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1.	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian dan surat menyurat				900	1200		828	1164 surat		92 %	97 %	
2	Jumlah koordinasi bidang ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan				12	12		12	12		100%	100%	
3.	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun buku profil desa/kelurahan				21	21		21	21		100%	100%	
5.	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disususun tepat waktu				3	3		3	3		100%	100%	
6.	Jumlah peserta musrenbang kecamatan yang hadir				115	115		104	102		91 %	89 %	
7.	Jumlah pelayanan legalisasi surat menyurat dan pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Pindah Keluar dan Masuk)				1500	1620		1380	1458		92 %	90 %	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sukomoro menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

   a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

      1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Sukomoro;
      2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
      3) Pola kerja di Kecamatan Sukomoro yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
      4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
      5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
      6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

   b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

      1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
      2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin

dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.

3) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
4) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD/Korwil yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Sukomoro;
4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

A. Tujuan

Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Penilaian sinergitas kecamatan memperhatikan aspek :
1. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
4. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
5. Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya

Adapun indikator penilaiannya terbagi menjadi 4 (empat) komponen :

1. Kompetensi
2. Inovasi/kreatifitas
3. Kepemimpinan
4. Kinerja/Komitmen

Hasil penilaian sinergitas kecamatan Sukomoro Tahun 2025 adalah belum ada, ha linin disebabkan proses penilaian sedang berjalan dan nilai sementara dalam system belum muncul/ada.

B. Sasaran Strategis yang Kesatu

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN), pada tahun 2025 Triwulan I Kecamatan Sukomoro memperoleh **89,74** dari target 88, sehingga capaiannya sebesar **101,97%.**

Angka tersebut didapat dari laporan survei melalui website https://sukma.jatimprov.go.id/ dengan responden sebanyak **131** (Seratus Tiga Puluh Satu) orang.

Gambar 2.1

Laporan survei IKM kecamatan Sukomoro



Dengan perhitungan sebagai berikut :
Perhitungan laporan survei IKM kecamatan Sukomoro
Gambar 2.2

121	3	3	4	4	4	4	4	3	4	Nurul Soeiman	33	Perempuan	2025-03-30 13:36:04
122	3	3	4	4	4	4	4	3	4	Abdul kolig	33	LAKI-LAKI	2025-03-30 13:37:20
123	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Krisna	23	LAKI-LAKI	2025-03-30 13:38:32
124	3	3	3	4	4	4	4	4	4	Fajo	60	LAKI-LAKI	2025-03-30 13:40:00
125	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Farida ulfa	26	Perempuan	2025-03-30 13:41:10
126	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Barkit jindan kanafitan	26	LAKI-LAKI	2025-03-30 13:42:43
127	3	3	4	4	4	4	4	4	4	Ahmad sujudi	34	LAKI-LAKI	2025-03-30 13:44:02
128	4	3	3	4	4	4	4	4	4	Wijianto	42	LAKI-LAKI	2025-03-30 13:45:12
129	4	3	3	4	4	4	4	4	4	Wahyu sebawan	20	LAKI-LAKI	2025-03-30 13:46:23
130	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Anang mazrani	43	LAKI-LAKI	2025-03-30 13:47:33
131	3	4	4	4	4	4	4	4	3	Bejo	65	LAKI-LAKI	2025-03-30 13:48:22
Nilai/Unsur	430	462	475	524	476	472	479	477	480				
NRR/Unsur	3.28	3.53	3.63	4.00	3.63	3.60	3.66	3.64	3.66				
NRR/Unsur X 25	82.06	88.17	90.65	100.00	90.84	90.08	91.41	91.03	91.60				
NRR Tertimbang/Unsur	0.36	0.39	0.40	0.44	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40				
JML NRR IKM TERTIMBANG	3.59												
JML NRR IKM TERTIMBANG x 25	89.74												

Indek Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 91,38 % sampai Tri Bulan I dari target sebesar 90,00 % . Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Sukomoro melebihi target :

1. Persyaratan (U1)
   Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi yang berlaku mencapai 86,59 %.
2. Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)
   Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Sukomoro sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat mencapai 87,5%.
3. Waktu Penyelesaian (U3)
   Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan mencapai 88,18 %.
4. Biaya/Tarif (U4)
   Biaya dalam pengurusan surat – surat dan Pelayanan di Keacamatan Sukomoro tidak dikenakab biaya/gratis mencapai 100 %.
5. Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)
   Jenis Pelayanan di Kecamatan Sukomoro antara lain :
   a. Pembuatan Akte Kelahiran
   b. Pembuatan Kartu Keluarga
   c. Perekaman KTP
   d. Pelayanan Pindah tempat
   e. Pembuatan dispensasi nikah
   f. Pembuatan PPAT

g. Pelayanan Hak Waris
h. Pelayanan rekomendasi kredit bank
i. Pelayanan Legalisasi surat surat

Untuk jenis Pelayanan mencapai 87,5 %.

6. Kompetensi Pelaksana (U6)
   Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, mencapai 88,18 %.
7. Perilaku Pelaksana (U7)
   Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan mencapai 88,18 %.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)
   Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR mencapai 100 %.
9. Sarana dan Prasarana (U9);
   Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Sukomoro sudah tersedia dengan kondisi yang baik mencapai 100 %.

Berdasarkan Hasil dari Capian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sukomoro diatas Penangananan Pengaduan/U8, Biaya yang Gratis/U4 dan Kompetesi Pelakasana/U6 memiliki nilai tertinggi dari Sembilan kategori Quisioner yang disampaikan kepada Masyarakat. Dengan Demikian secara keseluruhan IKM Kecamatan Sukomoro sampai Akhir Tri Bulan I Tahun 2024 mencapai 89,74 %, sehingga Capaian Kinerjanya sebesar **101,97%.**

C. Sasaran Strategis yang Kedua

Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan, target belum tercapai

Sasaran strategis yang kedua yaitu meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan pada Triwulan-I Tahun 2025 realisasi sebesar 26,67% dari target sebesar 30%. Capaian kinerjanya 88,90% Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sasaran strategis tersebut untuk capaian kinerjanya masuk kategori tinggi.

Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban Tahun 2024 sebanyak 25 laporan sedangkan laporan gangguan ketentraman dan ketertiban Tahun 2025 sebanyak 23 laporan, dengan demikian realisasi kinerjanya :

$\frac{25 - 23}{25} = X\ 100\% = 8{,}00\ \%$

Sedangkan Realisasinya = 8/30 x 100% = 26,67%

Sedangkan Capaian Kinerjanya = $\frac{26{,}67}{30} \times 100\% = 88{,}90\%$

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih kurang • Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Sukomoro, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan

(stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

2.3.3.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Sukomoro.

1. Tugas Pokok
   Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi
   Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat Sukomoro Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

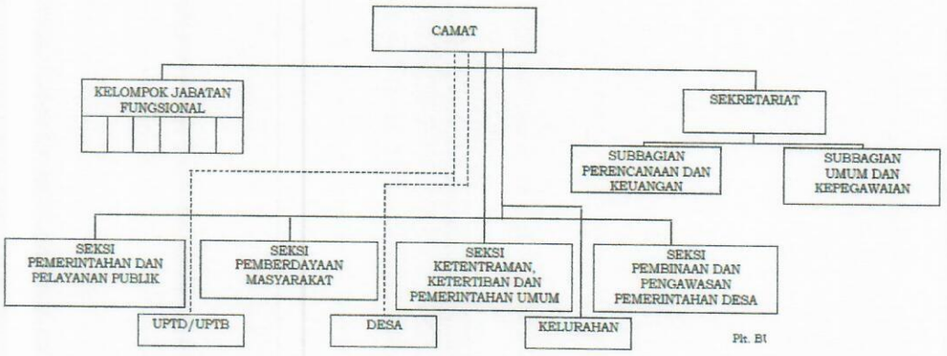
   a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
   b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
   c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.
   e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan.
   f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
   g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada
   h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
   i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

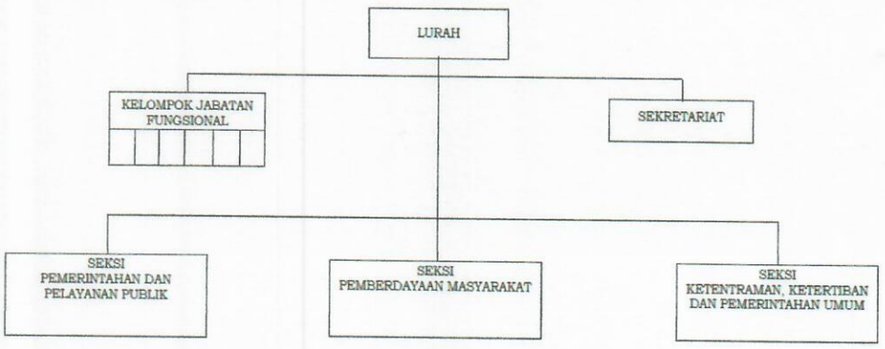
Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN SUKOMORO DAN KELURAHAN KAPAS

KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat Sukomoro Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.
e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan.
f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi. Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
b. Pengelolaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1) Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3) Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4) Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
5) Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
6) Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
7) Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
9) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1) Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
2) Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
3) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
4) Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
5) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
6) Melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

1) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
2) Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
3) Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
5) Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
6) Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
7) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
8) Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
10) Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;

11) Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

1) Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2) Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4) Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6) Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
7) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
8) Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9) Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
10) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
11) Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
12) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
13) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2) Pemberdayaan masyarakat;
3) Pelayanan masyarakat;

4) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5) Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketatausahaan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di kelurahan;
b) Pengelolaan urusan keuangan;
c) Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d) Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan;
b) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
c) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
d) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
b) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang di wilayah kerja kelurahan;
c) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
d) Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan;
e) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) **Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum**
Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b) Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kelurahan;
c) Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d) Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
e) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku, dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
f) Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
h) Melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan urusan Pemilihan Umum (Pemilu) serta pembinaan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); dan
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Kecamatan Sukomoro

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Sukomoro dan Kelurahan Sukomoro, Kelurahan Kapas adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Sukomoro dan Kelurahan Sukomoro, Kelurahan Kapas sebanyak 13 (tiga belas) jabatan, yang terisi sebanyak 8 (delapan) jabatan struktural dan 5 (lima) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 15 (empat belas) orang staf fungsional umum. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sukomoro
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah Pejabat	Jumlah Jabatan
1.	Camat	III-A	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	III-B	0	1
3.	Kepala Seksi	IV-A	4	4
4.	Kasubbag	IV-B	0	2
5.	Lurah	IV-A	2	2
6.	Sekkel	IV-B	2	2
7-	Kasi di Kelurahan	IV-B	3	6
8.	Fungsional Umum di Kecamatan	-	1	-
9.	Fungsional Umum di Kelurahan	-	4	-
Jumlah			**18**	

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Sukomoro sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sukomoro
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat 1	IV/b	1
2.	Penata Tingkat I	III/d	8
3.	Penata	III/c	3
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	1
5.	Penata Muda	III/a	0
6.	Pengatur Tk. I	II/d	5
7.	Pengatur	II/c	0
8.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0
Jumlah			**18**

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat pegawai Kecamatan Sukomoro dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sukomoro
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2024

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	1
2.	S1	11
3.	D3	0
4.	SMA	6
5.	SMP	0
	JUMLAH	**18**

2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 4 (empat) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat
3. Sarana alat transportasi yang meliputi
   a. Roda empat sebanyak 1 (satu) buah yaitu berupa Isuzu Panther Tahun 2014.
   b. Roda dua sebanyak 2 (dua) Unit yaitu Honda Supra X125 Tahun 2007 dan Yamaha Vixion Tahun 2014
4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :

Meja Kerja	: 25 buah
Meja layanan	: 1 nuah
Kursi	: 115 buah
Bangku Panjang	: 1 buah
Komputer khusus KTP SIAK	: 1 Unit
Komputer e-KTP	: 2 Unit
Laptop	: 4 Unit
Mesin Ketik	: -
Printer	: 4 Unit
Telepon	: 1 (satu) unit
TV	: 8 Unit
Kursi Sofa	: 3 Unit

2.3.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sukomoro menggunakan analisis lingkungan strategis

(Analisis SWOT/*Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Sukomoro;
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kecamatan Sukomoro yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6. SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD/Korwil yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
4. Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Sukomoro;
4. Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih kurang • Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Sukomoro, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

2.3.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Program Prioritas Daerah serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 adalah **"NGANJUK YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA"**, pelaksanaan jangka menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang dimaksud dijabarkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang akuntabel.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya, serta tangguh.

(Kecamatan Sukomoro) memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah "NGANJUK AKUNTABEL" yakni Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang akuntabel.

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.

11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.3.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.4.1. Tantangan

a. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
b. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Sukomoro harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
c. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
d. Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (*Good Governance*)
e. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.
f. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
g. Income perkapita masyarakat masih rendah.
h. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
i. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Sukomoro

2.3.4.2. **Peluang**

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Sukomoro dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Sukomoro untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Sukomoro dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sukomoro;
e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sukomoro, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Sukomoro;
g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Sukomoro. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD) dan Dana Desa;

Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Sukomoro. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka Stunting.

2.3.3.5. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Pada Subbab 2.2 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangkat Daerah khususnya Kecamatan Sukomoro, yang ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Sukomoro, yaitu:

a. ***Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.***

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

b. ***Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.***

Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c. ***Pelayanan Prima.***

Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

d. ***Peningkatan Sinergitas Kecamatan.***

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Sukomoro guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

e. ***Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan.***

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial, perekonomian dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas

f. ***Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.***

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yangada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur:

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari akademisi, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi, serta keterwakilan Desa dan/atau Kelurahan yang terkait langsung dengan pelayanan Kecamatan Sukomoro, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sukomoro disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

3.1 Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi 2025 (Rp.)
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publikdengan pemanfaatanteknologi informasi(e-gov)Meningkatkan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi(e-gov)	**6.652.261.123**

3.2 Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Tujuan :** Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	85	-	-
2	**Sasaran 1 :** Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	88	89,74	101,97%
	Sasaran 2 : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	9	26,67	88,90%

Sumber Data : Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam perubahan Perubahan Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 memedomani agenda pembangunan Nasional dan Daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Adapun usulan Perubahan Rencana Kerka Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro tercantum dalam Matrik Perubahan Rencana Kerja sebagaimana berikut :

Tabel 4.3
Matrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - Kecamatan Sukomoro
(Sebagai Berikut)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN SUKOMORO							**5.979.390.163,00**	**5.343.622.164,00**	**6.057.261.122,00**	**677.870.959,00**							**6.034.072.403,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.979.390.163,00**	**5.343.622.164,00**	**6.057.261.122,00**	**677.870.959,00**							**6.034.072.403,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.979.390.163,00**	**5.343.622.164,00**	**6.057.261.122,00**	**677.870.959,00**							**6.034.072.403,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Kecamatan**				**80 Nilai**	**80 Nilai**	**4.390.828.783,00**	**3.863.608.764,00**	**5.238.801.982,00**	**146.713.860,00**							**4.836.540.603,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun*				2 dokumen	2 dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	2.734.000,00	-4.266.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC :SUKOMORO		7.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	400.000,00	-1.100.000,00	Kab :Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	914.000,00	-2.586.000,00	Kab :Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*				3 dokumen	3 dokumen	2.872.486.422,00	2.918.737.502,00	4.054.884.000,00	1.182.397.578,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC :SUKOMORO		3.133.932.553,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.741.466.422,00	2.798.197.502,00	3.935.301.000,00	1.193.834.578,00	Kab :Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.593.156.553,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	43.260.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	-8.160.000,00	Kab :Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			45.420.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Kab :Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.600.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	12.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-4.000.000,00	Kab :Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			12.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelolakan*				12 Laporan 12 unit	12 Laporan 12 unit	18.160.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-2.160.000,00			-	P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC :SUKOMORO		16.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab :Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab :Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				2 dokumen	2 dokumen	81.000.000,00	55.000.000,00	24.200.000,00	-56.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		81.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	81.000.000,00	55.000.000,00	24.200.000,00	-56.800.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			81.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah*				6 dokumen	6 dokumen	319.066.888,00	245.442.926,00	223.055.526,00	-96.011.362,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		279.598.450,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.994.000,00	5.244.000,00	5.244.000,00	-2.750.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	24.943.778,00	3.563.100,00	3.563.100,00	-21.380.678,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.642.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	66.661.610,00	54.264.226,00	54.264.226,00	-12.397.384,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			60.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			9.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	39.978.000,00	39.978.000,00	19.754.000,00	-20.224.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	39.557.000,00	13.357.000,00	13.344.400,00	-26.212.600,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			23.862.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dibedakan*				55 unit	55 unit	300.889.831,00	79.693.536,00	376.658.436,00	75.768.605,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		223.983.200,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	41.724.200,00	0,00	0,00	-41.724.200,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			41.724.200,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	28.798.743,00	15.000.000,00	7.158.600,00	-21.640.143,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	98.805.205,00	6.660.000,00	17.514.000,00	-81.291.205,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			80.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penujang urusan pemerintah daerah*				13 laporan	13 laporan	360.368.000,00	350.648.000,00	337.948.000,00	-22.420.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		366.163.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			42.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	151.736.000,00	142.136.000,00	124.936.000,00	-26.800.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			153.711.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpelihara*				47 unit	47 unit	431.855.612,00	181.086.900,00	203.022.000,00	-228.833.612,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		428.863.400,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya				1 Unit	1 Unit	39.999.000,00	39.999.000,00	39.999.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	UNIT/SKPD PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			17.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang DipeliharaDirehabilitasi				1 Unit	1 Unit	257.339.112,00	63.900.300,00	81.100.300,00	-176.238.812,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			253.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib**				**95 Nilai**	**95 Nilai**	**93.270.000,00**	**74.720.000,00**	**37.580.000,00**	**6.730.000,00**							**90.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan*				6 laporan	6 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.780.000,00	-5.220.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk		10.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.780.000,00	-5.220.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah dokumen koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum*				4 dokumen	4 dokumen	40.250.000,00	31.700.000,00	17.700.000,00	-22.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk		45.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.02.2.05.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	40.250.000,00	31.700.000,00	17.700.000,00	-22.550.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			45.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan*				12 laporan	12 laporan	33.020.000,00	33.020.000,00	15.100.000,00	-17.920.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk		35.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	33.020.000,00	33.020.000,00	15.100.000,00	-17.920.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**				**88 Nilai**	**88 Nilai**	**894.382.400,00**	**649.782.400,00**	**866.432.160,00**	**-106.382.400,00**							**788.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dalam pembangunan di kecamatan*				21 lembaga kemasyarakatan	21 lembaga kemasyarakatan	65.760.000,00	65.760.000,00	64.260.000,00	-1.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk		58.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	40.885.000,00	40.885.000,00	40.885.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab .Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAKUPAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	24.875.000,00	24.875.000,00	23.375.000,00	-1.500.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			23.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase permasalahan trantibum yang ditangani**				**95 %**	**95 %**	**36.702.200,00**	**36.702.200,00**	**36.702.200,00**	**-1.702.200,00**							**35.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah laporan hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				4 laporan	4 laporan	36.702.200,00	36.702.200,00	35.702.200,00	-1.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk		35.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	36.702.200,00	36.702.200,00	35.702.200,00	-1.000.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang Aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**				**95 %**	**95 %**	**76.000.000,00**	**49.500.000,00**	**49.500.000,00**	**0,00**							**76.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan*				200 Orang	200 Orang	76.000.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	-26.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk		76.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	200 Orang	76.000.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	-26.500.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			76.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
6	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**				**88 Nilai**	**88 Nilai**	**498.228.800,00**	**479.228.800,00**	**439.544.800,00**	**10.303.000,00**							**508.531.800,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah desa/kelurahan cepat berkembang*				12 desa/kel urban	12 desa/kel urban	498.228.800,00	479.228.800,00	439.544.800,00	-58.684.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		508.531.800,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				21 Dokumen	21 Dokumen	178.789.000,00	165.789.000,00	123.545.000,00	-55.244.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			178.789.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				12 Dokumen	12 Dokumen	6.353.000,00	6.353.000,00	3.353.000,00	-3.000.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			9.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
		KELURAHAN SUKOMORO							**5.979.390.163,00**	**5.343.822.164,00**	**6.667.261.122,00**	**677.870.959,00**							**6.034.072.403,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.979.390.163,00**	**5.343.822.164,00**	**6.667.261.122,00**	**677.870.959,00**							**6.034.072.403,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.979.390.163,00**	**5.343.822.164,00**	**6.667.261.122,00**	**677.870.959,00**							**6.034.072.403,00**	

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Kecamatan**				**85 Nilai**	**85 Nilai**	**4.390.826.753,00**	**3.853.608.764,00**	**5.236.801.962,00**	**146.713.050,00**							**4.536.640.603,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*				3 dokumen	3 dokumen	2.872.486.422,00	2.918.737.502,00	4.654.884.000,00	1.182.397.578,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		3.133.932.553,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	35.580.000,00	37.260.000,00	37.260.000,00	1.680.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Sukomoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			43.176.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan* *Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan*				12 Laporan 65 unit	12 Laporan 65 unit	18.160.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-2.160.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		16.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.160.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-2.160.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Sukomoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah*				6 dokumen	6 dokumen	319.066.888,00	245.442.926,00	223.055.526,00	-96.011.362,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		279.598.480,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.828.250,00	1.828.250,00	1.828.250,00	0,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Sukomoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.622.900,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.657.400,00	31.657.400,00	27.099.800,00	-4.557.600,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Sukomoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.213.570,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	835.750,00	835.750,00	5.948.250,00	5.112.500,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Sukomoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			835.500,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.020.000,00	5.020.000,00	11.020.000,00	6.000.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.190.000,00	6.595.000,00	6.595.000,00	-10.595.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.597.000,00	KECAMATAN SUKOMORO

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang disediakan*				55 unit	55 unit	300.889.831,00	39.693.536,00	376.658.436,00	75.768.605,00			-	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		223.983.200,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab :Nganjuk, Sukomoro, Sekomoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik				0,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	67.745.600,00	16.000.000,00	23.272.300,00	-44.473.300,00	Kab :Nganjuk, Sukomoro, Sekomoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			40.959.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah undefined*				13 laporan undefined undefined	13 laporan undefined undefined	360.368.000,00	350.648.000,00	337.948.000,00	-22.420.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		366.163.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	Kab :Nganjuk, Sukomoro, Sekomoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.800.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	68.928.000,00	66.408.000,00	66.408.000,00	-2.520.000,00	Kab :Nganjuk, Sukomoro, Sekomoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			63.252.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpelihara*				47 unit	47 unit	431.855.612,00	181.086.800,00	203.022.000,00	-228.833.612,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		428.863.400,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	4.668.900,00	4.668.900,00	11.284.100,00	6.615.200,00	Kab :Nganjuk, Sukomoro, Sekomoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.324.900,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Kab :Nganjuk, Sukomoro, Sekomoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			948.500,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	7.120.000,00	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	Kab :Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab :Nganjuk, Sukomoro, Sekomoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.140.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	54.102.400,00	10.922.400,00	10.922.400,00	-43.180.000,00	Kab :Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**				**88 Nilai**	**88 Nilai**	**894.362.400,00**	**849.762.400,00**	**866.432.160,00**	**-108.362.400,00**							**788.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dalam pembangunan dikecamatan*				2 lembaga kemasyarakatan	2 lembaga kemasyarakatan	828.602.400,00	784.002.400,00	792.172.160,00	-36.430.240,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik| P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		730.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	410.686.000,00	371.086.000,00	371.086.000,00	-39.600.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Sokomoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik| P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			285.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	67.916.400,00	67.916.400,00	70.005.580,00	2.089.180,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Sokomoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik| P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			65.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**				**88 Nilai**	**88 Nilai**	**498.228.800,00**	**479.228.800,00**	**439.544.800,00**	**10.303.000,00**							**508.531.800,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah desa/kelurahan cepat berkembang*				21 desa/kelurahan	21 desa/kelurahan	498.228.800,00	479.228.800,00	439.544.800,00	-58.684.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik| P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		508.531.800,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				12 Dokumen	12 Dokumen	148.486.800,00	142.486.800,00	138.746.800,00	-9.740.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Sokomoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik| P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			133.342.800,00	KECAMATAN SUKOMORO
		KELURAHAN KAPAS							**5.979.390.163,00**	**5.343.622.164,00**	**6.667.261.122,00**	**677.870.969,00**							**6.034.072.403,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.979.390.163,00**	**5.343.622.164,00**	**6.667.261.122,00**	**677.870.969,00**							**6.034.072.403,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.979.390.163,00**	**5.343.622.164,00**	**6.667.261.122,00**	**677.870.969,00**							**6.034.072.403,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Kecamatan**				**85 Nilai**	**85 Nilai**	**4.390.626.753,00**	**3.853.608.764,00**	**5.238.601.962,00**	**146.713.050,00**							**4.536.540.603,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	2.734.000,00	-4.266.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik| P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		7.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.420.000,00	-580.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik| P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	2.872.486.422,00	2.918.737.502,00	4.054.884.000,00	1.182.397.578,00			-	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik| P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		3.133.932.553,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	35.580.000,00	35.580.000,00	35.580.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik| P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.580.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.043.000,00	-957.000,00	Kab Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-						18.160.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-2.160.000,00			-	P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		16.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	319.066.888,00	245.442.926,00	223.055.526,00	-96.011.362,00			-	P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		279.598.450,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.555.650,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-55.650,00	Kab Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.757.500,00	3.500.000,00	1.499.400,00	-2.258.100,00	Kab Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	48.588.150,00	43.350.400,00	43.894.750,00	-4.703.400,00	Kab Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			60.325.480,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.499.800,00	1.499.800,00	1.050.350,00	-449.450,00	Kab Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	15.250.000,00	11.460.000,00	1.460.000,00	Kab Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang disediakan*				65 Unit	65 Unit	300.889.831,00	79.693.536,00	376.658.436,00	75.768.605,00			-	P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		223.983.200,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	17.622.083,00	11.619.536,00	11.619.536,00	-6.002.547,00	Kab Nganjuk, Sukomoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			16.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dibeckatan				4 Unit	4 Unit	-46.194.000,00	30.414.000,00	17.094.000,00	-29.100.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.300.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	360.368.000,00	350.648.000,00	337.948.000,00	-22.420.000,00			-	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		366.163.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibeckatan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	10.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.500.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibeckatan				12 Laporan	12 Laporan	86.904.000,00	86.904.000,00	86.904.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			97.900.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara*				65 Unit	65 Unit	431.855.612,00	181.086.800,00	203.022.000,00	-228.833.612,00			-	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		428.863.400,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	3.226.200,00	3.226.200,00	3.226.200,00	0,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.200.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			750.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	8.000.000,00	3.850.000,00	1.970.000,00	-6.030.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.500.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**				**88 Nilai**	**88 Nilai**	**894.382.400,00**	**849.782.400,00**	**886.432.160,00**	**-106.382.400,00**							**788.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sukomoro yang aktif dalam pembangunan di kecamatan*				1 lembaga kemasyarakatan	1 lembaga kemasyarakatan	828.602.400,00	784.002.400,00	792.172.160,00	-36.430.240,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		730.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			330.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.05.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Poknas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Poknas / Ormas	2 Poknas / Ormas	50.000.000,00	45.000.000,00	51.080.580,00	1.080.580,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
3	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**				**88 Nilai**	**88 Nilai**	**498.228.800,00**	**479.228.800,00**	**439.544.800,00**	**10.303.000,00**							**508.531.800,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Kelurahan Kapas Cepat Berkembang*				20 Dokumen	20 Dokumen	498.228.800,00	479.228.800,00	439.544.800,00	-58.684.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	KEC. SUKOMORO		508.531.800,00	KECAMATAN SUKOMORO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				12 Dokumen	12 Dokumen	156.600.000,00	156.600.000,00	168.900.000,00	12.300.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Kapas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			167.400.000,00	KECAMATAN SUKOMORO
	JUMLAH								**5.979.390.153,00**	**5.343.522.164,00**	**6.857.261.122,00**	**677.870.969,00**							**6.034.072.403,00**	

Tabel 4.4
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	

NIHIL

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Kecamatan Sukomoro sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Sukomoro Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Kecamatan Sukomoro Tahun 2024-2026, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Sukomoro dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPD dan Renstra Kecamatan Sukomoro yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Kecamatan Sukomoro Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Sukomoro, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukomoro; dan
   c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukomoro dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Sukomoro.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Perubahan Renja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Sukomoro dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001